



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
JL. CIKINI II/3 Telp. 31925567 Faxes. 3152023
JAKARTA (Kode Post : 10330)
website : www.baliprov.go.id

Kepada

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Bali

di –

Denpasar

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045.2/ 1900 /TU/BPPROV

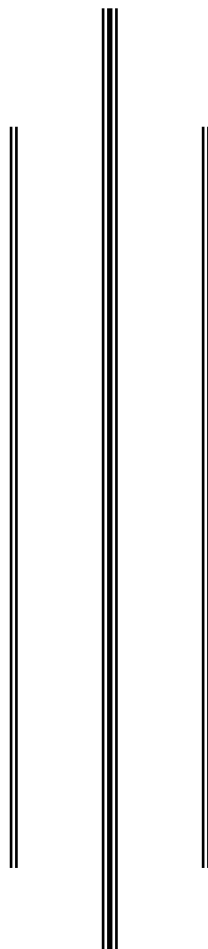
No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020	1 (satu) gabung	Dengan hormat, dikirim untuk memenuhi permintaan Surat Edaran Nomor : 3091 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020

Jakarta, 7 September 2020
KEPALA BADAN

I GUSTI NGURAH WIBAWA
NIP. 19631215 198903 1 015



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, Rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 dapat disusun. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu Renja dapat dilakukan revisi, hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada sampai dengan triwulan 1 2020, namun dengan adanya rasionalisasi secara signifikan maka ada beberapa perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2020. Mengingat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Penghubung Provinsi Bali membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

KEPALA BADAN,

I GUSTI NGURAH WIBAWA

NIP. 19631215 198903 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUSI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1 Capaian kinerja dan keuangan.....	9
2.2 Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.....	12
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	14
BAB V P E N U T U P	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporam kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung,

review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional.

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu OPD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu Rencana Kerja dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dan Renja dimaksud seperti (1) penyeselarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2020; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus dipergunakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);³
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi

Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan perubahan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Meliputi capaian kinerja dan keuangan, kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Memuat matrik perubahan rencana dan pendanaannya

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja dan Keuangan

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2020. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan Badan Penghubung. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian sasaran Badan Penghubung yang tertuang dalam dokumen Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan II Tahun 2020 secara keseluruhan realisasi

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Subbid di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali telah mencapai 72% persen dengan realisasi keuangan mencapai 64,18%. Semua program dan kegiatan pada triwulan I dapat berjalan sesuai target. Namun pada triwulan II ada rasionalisasi yang secara signifikan mengambil hampir seluruh anggaran yang tersisa sampai dengan bulan April 2020 sehingga merubah target kinerja dan keuangan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Berikut rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel

Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan setelah rasionalisasi s.d triwulan II

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Triwulan 1		Triwulan 2	
			Keuangan	Kinerja (%)	Keuangan	Kinerja (%)
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja					
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	549.000	25	2.142.000	50
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	185.200.000	37.299.297	25	59.952.210	50
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	369.667.912	79.270.978	25	176.287.959	50
	Penyediaan ATK	9.977.600	4.320.000	50	9.977.600	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.289.900	3.289.900	100,00	3.289.900	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12.500.000	6.250.000	50,00	12.500.000	100,00

	bangunan kantor					
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	5.000.000	870.000	25	870.000	50
	Penyediaan makanan dan minuman	5.600.000	3.150.000	50	5.600.000	100,00
	Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	49.504.180	49.504.180	100,00	49.504.180	100,00
	Upacara keagamaan	75.000.000	15.000.000	25	19.000.000	50
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	49.950.000	49.950.000	100,00	49.950.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor	358.567.912	75.870.978	25	165.187.959	50
	Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas	784.492.632	177.517.275	25	321.450.815	50
	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	18.100.000	7.110.000	25	9.915.000	50
	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	8.199.800	7.799.800	50	8.199.800	100,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-
	penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	73.400.000	300.000	25	500.000	50
2	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah					
	Pagelaran seni budaya	-	-		-	
	Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya	49.459.600	49.419.600	100,00	49.459.600	100,00
	Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah	869.628.608	245.544.986	25	410.789.641	50

Sedangkan Kinerja Badan Penghubung sesuai dengan sasaran Renstra dan Renja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II yaitu indeks kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali telah mencapai nilai IKM 85,92 dapat di rinci sebagai berikut :

1. IKM Penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga : 92,2 (sangat baik)
2. IKM Penerima pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung : 86,58 (baik)
3. IKM Pelanggan wisma Badan Penghubung : 67.09 (kurang)
4. IKM Pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII : 98 (sangat baik)

2.2 Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia belum memadai

Secara kuantitas dan kualitas tenaga PNS maupun tenaga kontrak di Badan Penghubung Provinsi Bali belum memadai, maka untuk menunjang pelayanan yang prima perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- 2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan alat transportasi yang memadai, sarana promosi dan informasi berupa replika budaya

dan seni, pamflet/brosur, VCD seni dan budaya. Dan anggaran untuk menyelenggarakan pagelaran seni secara rutin.

- 3) Jumlah kamar/wisma dan bangunan wisma yang sudah tidak representatif sehingga tidak dapat bersaing dengan city hotel yang telah banyak dibangun di sekitar wisma
- 4) Adanya rasionalisasi anggaran yang signifikan sehingga membuat rencana dan target yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan.

Implikasi yang timbul sebagai akibat tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja, menyebabkan target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, perlu ditetapkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi dan informasi hasil pembangunan daerah Bali melalui pemeran kerajinan dan ekonomi serta pertunjukan/pagelaran-pagelaran kesenian.
3. Melaksanakan pembangunan gedung kantor dan wisma yang baru sesuai dengan dokumen perencanaan (DED) yang telah dibuat (tergantung arahan Bappeda terkait alokasi anggaran).
4. Mengajukan anggaran yang sangat urgent dibutuhkan di APBD perubahan 2020 untuk Badan Penghubung Provinsi Bali

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan penguatan anggaran dalam rangka penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan social safety net/jaring pengaman social sebagai akibat pandemi COVID-19, maka dilakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk dapat menunda anggaran yang tidak mendesak. Kebijakan tersebut menyebabkan perlu dilakukan perubahan capaian target kinerja dan pendanaan pada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada Renja Badan Penghubung Induk Tahun 2020.

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 meliputi hal-hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penyesuaian terhadap target kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2020;
3. Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak prioritas mendesak.

Perubahan anggaran pada program/kegiatan pembangunan pada pada rancangan akhir perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Urusan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Induk	Perubahan	meningkat/menurun	Prakiraan maju
4.11.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT						4.192.250.787,00	3.347.538.114,00	(-844.712.643,00)	4.557.798.440,00
4.11.01.	Badan Penghubung						4.192.250.787,00	3.347.538.114,00	(-844.712.643,00)	4.557.798.440,00
4.11.01.01.	- Badan Penghubung						4.192.250.787,00	3.347.538.114,00	(-844.712.643,00)	4.557.798.440,00
4.11.4.11.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				2.476.075.882,00	2.339.949.936,00	(-136.125.946,00)	2.473.305.979,00
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	Jakarta	2.476.075.882,00	2.339.949.936,00	(-136.125.946,00)	2.473.305.979,00
4.11.4.11.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Input : Tersedianya Dana			5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
				Output Induk : Administrasi surat menyurat perkantoran berjalan lancar	1 tahun					
				Output Perubahan : Terkirimnya surat/dokumen ke alamat yang dituju						
				Outcome : Terlayannya jasa surat-menyurat	100%					
4.11.4.11.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Input : Tersedianya Dana			200.000.000,00	185.200.000,00	(-14.800.000,00)	0
				Output Induk : Terbayarnya biaya listrik dan telepon tepat waktu	12 bulan					
				Output Perubahan : Terbayarnya biaya listrik dan telepon tepat waktu						
				Outcome : Terlayannya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%					
4.11.4.11.01.	Penyediaan Jasa			Input : Tersedianya Dana			356.082.046,00	369.667.912,00	13.585.866,00	0

01.01.03.	Kebersihan Kantor			Output Induk : terwujudnya kebersihan kantor Ouput Perubahan : terwujudnya kebersihan kantor Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor	12 bulan 100%					
4.11.4.11.01.01.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Ouput Perubahan : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Outcome : Terwujudnya sarana penunjang untuk aktifitas administrasi kantor	 12 bulan 100%		20.000.000,00	9.977.600,00	(-10.022.400,00)	0
4.11.4.11.01.01.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Input : Tersedianya Dana Output Induk : tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Ouput Perubahan : tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Outcome : terwujudnya pencetakan blanko	 12 bulan 100%		20.000.000,00	3.289.900,00	(-16.710.100,00)	0
4.11.4.11.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Input : Tersedianya Dana Output Induk : terwujudnya penerangan gedung kantor yang baik Ouput Perubahan : terwujudnya penerangan gedung kantor yang baik Outcome : Penerangan kantor menjadi baik	 1 tahun 100%		25.000.000,00	12.500.000,00	(-12.500.000,00)	0
4.11.4.11.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Input : Tersedianya Dana Output Induk : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mendukung	 1 tahun		5.000.000,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00

				kegiatan						
				Ouput Perubahan : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mendukung kegiatan						
				Outcome : Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktifitas kantor	100%					
4.11.4.11.01.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Input : Tersedianya Dana			7.000.000,00	5.600.000,00	(-1.400.000,00)	16.500.000,00
				Output Induk : terpenuhi makanan dan minuman untuk rapat kegiatan kantor	12 bulan					
				Ouput Perubahan : terpenuhi makanan dan minuman untuk rapat kegiatan kantor						
				Outcome : Lancarnya tugas-tugas Badan Penghubung Provinsi Bali	100%					
4.11.4.11.01.01.01.09.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			Input : Tersedianya Dana			400.000.000,00	79.504.180,00	(-320.495.820,00)	400.000.000,00
				Output Induk : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar	12 bulan					
				Ouput Perubahan : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar						
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	100%					
4.11.4.11.01.01.01.10.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana			75.000.000,00	75.000.000,00	0	108.796.662,00
				Output Induk : terlaksananya upacara keagamaan yang mendukung kegiatan kantor	12 bulan					
				Ouput Perubahan : terlaksananya upacara keagamaan yang mendukung kegiatan kantor						
				Outcome : Tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor	100%					

4.11.4.11.01.01.12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	114.950.000,00	64.950.000,00	230.800.000,00
				Output Induk : tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Ouput Perubahan : tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun					
				Outcome : Terwujudnya sarana perlengkapan kantor yang berdaya guna	100%					
4.11.4.11.01.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			357.293.824,00	418.567.912,00	61.274.088,00	655.902.017,00
				Output Induk : terpeliharanya gedung/kantor dengan baik Ouput Perubahan : terpeliharanya gedung/kantor dengan baik	12 bulan					
				Outcome : Terwujudnya Sarana Kantor yang Terawat	100%					
4.11.4.11.01.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Input : Tersedianya Dana			778.000.012,00	799.492.632,00	21.492.620,00	881.997.300,00
				Output Induk : Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia, Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 dan R4 yang dipelihara secara optimal Ouput Perubahan : Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia, Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 dan R4 yang dipelihara secara optimal	1 tahun					
				Outcome : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara optimal	100%					
4.11.4.11.01.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			89.300.000,00	18.100.000,00	(-71.200.000,00)	86.900.000,00
				Output Induk : peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang berdaya guna Ouput Perubahan : peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang berdaya guna	12 bulan					

				Outcome : Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang berdaya guna	100%					
4.11.4.11.01.01.01.23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Input : Tersedianya Dana						
				Output Induk : -			-	151.000.000,00	151.000.000,00	-
				Ouput Perubahan : akses disabilitas pada Anjungan Bali TMII Jakarta	1 paket					
				Outcome : tersedianya akses bagi penyandang disabilitas	1 paket					
4.11.4.11.01.01.01.24	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja			Input : Tersedianya Dana			10.000.000,00	8.199.800,00	(-1.800.200,00)	10.010.000,00
				Output Induk : dokumen perencanaan yang memadai	1 tahun					
				Ouput Perubahan : dokumen perencanaan yang memadai						
				Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3 Dokumen					
4.11.4.11.01.01.01.50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Input : Tersedianya Dana			5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
				Output Induk : tersedianya tabung pemadam yang siap pakai	1 tahun					
				Ouput Perubahan : tersedianya tabung pemadam yang siap pakai						
				Outcome : Terwujudnya bahan logistik kantor yang siap pakai	100%					
4.11.4.11.01.01.01.55	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Input : Tersedianya Dana			73.400.000,00	73.400.000,00	0	77.400.000,00
				Output Induk : terbayarnya PBB dan iuran lainnya dengan tepat waktu	1 tahun					
				Ouput Perubahan : terbayarnya PBB dan iuran lainnya dengan tepat waktu						
				Outcome : Pembayaran PBB dan iuran tepat waktu	100%					
4.11.4.11.01.01.02	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan				1.716.174.905,00	1.007.588.208,00	(-708.586.697,00)	2.084.492.461,00

	Informasi Potensi Daerah	Publik	yang baik							
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	75	Jakarta	1.716.174.905,00	1.007.588.208,00	(-708.586.697,00)	2.084.492.461,00
4.11.4.11.01.01.02.01.	Kegiatan Pagelaran Seni budaya			Input : Tersedianya Dana			332.106.000,00	0	(-332.106.000,00)	568.369.705,00
				Output Induk : terselenggaranya promosi kebudayaan Bali Ouput Perubahan : terselenggaranya promosi kebudayaan Bali	-					
				Outcome : Persentase peningkatan informasi kebudayaan Bali yang diterima oleh pengunjung	100%					
4.11.4.11.01.01.02.02.	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya			Input : Tersedianya Dana			120.206.451,00	49.459.600,00	(-70.746.851,00)	228.443.951,00
				Output Induk : terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta Ouput Perubahan : terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	50 Orang					
				Outcome : Persentase masyarakat Bali di Jakarta yang terbina dengan baik	100%					
4.11.4.11.01.01.02.03.	Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah			Input : Tersedianya Dana			1.263.862.454,00	958.128.608,00	(-305.733.846,00)	1.287.678.805,00
				Output Induk : terlaksananya kegiatan rutin pimpinan dengan lancar Ouput Perubahan : terlaksananya kegiatan rutin pimpinan dengan lancar	1 tahun					
				Outcome : Persentase kelancaran kegiatan rutin pimpinan daerah	100%					

Pada perubahan APBD 2020 Badan Penghubung telah disetujui untuk menambah anggaran sesuai nota dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang telah dikompulir di Subbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Bali untuk dapat diberikan tambahan sesuai dengan skala prioritas. Adapun pengajuan nota dinas pergeseran dan penambahan anggaran Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Nota dinas Nomor : 910/579.a/BPPROV tanggal 17 Pebruari 2020 usulan penambahan anggaran berupa :

- Penyediaan akses disabilitas di Anjungan Daerah Bali TMII Rp. 151.500.000
- Pengadaan papan nama instansi dan papan informasi berbagai bangunan di Anjungan Bali TMII Rp. 65.000.000

2. Nota dinas Nomor : 910/1368/TU/BPPROV tanggal 2 Juni 2020 usulan pergeseran penambahan anggaran sejumlah Rp. 198.500.000 dengan rincian :

- Pergeseran anggaran sebesar dari jasa pengawalan dan belanja jasa tol/parkir Rp. 59.000.000

Penambahan anggaran Rp. 257.500.000 dengan rincian :

- pemeliharaan atap plafon Rp. 60.000.000
- Pemeliharaan kendaraan pimpinan Rp. 15.000.000
- Pass bandara protokol pimpinan Rp. 17.500.000
- Karangan bunga Rp. 10.000.000
- Makanan dan minuman tamu pimpinan Rp. 100.000.000
- SPPD dalam daerah protokol pimpinan Rp. 20.000.000
- SPPD luar daerah Rp. 30.000.000
- Pengisian tabung pemadam Rp. 5.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan penerima pelayanan. Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, top-down dan bottom-up diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerima pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pelayanan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

KEPALA BADAN,

I GUSTI NGURAH WIBAWA
NIP. 19631215 198903 1 015

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RENJA TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Organisasi/SUB PD : 4.11.01.01 - Badan Penghubung

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Induk	Perubahan	Induk	Perubahan	Meningkat / Menurun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.11.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT					4.192.250.787,00	3.347.538.144,00	(-844.712.643,00)			4.557.798.440,00
4.11.4.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja					2.476.075.882,00	2.339.949.936,00	(-136.125.946,00)			2.473.305.979,00
		Nilai evaluasi manajemen kinerja		80	80	2.476.075.882,00	2.339.949.936,00	(-136.125.946,00)		83	2.473.305.979,00
4.11.4.11.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			0,00
		Keluaran: Terkirimnya surat/dokumen ke alamat yang dituju		1 tahun	1 tahun					-	
		Hasil : Terlayannya jasa surat-menyurat		100 %	100 %						
4.11.4.11.01.01.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			200.000.000,00	185.200.000,00	(-14.800.000,00)			0,00
		Keluaran: Terbayarnya biaya listrik dan		12 bulan	12 bulan					-	

		telepon tepat waktu									
		Hasil : Terlayannya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.03.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			356.082.046,00	369.667.912,00	13.585.866,00			0,00
		Keluaran: terwujudnya kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan				-		
		Hasil : Terwujudnya kebersihan kantor		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			20.000.000,00	9.977.600,00	(-10.022.400,00)			0,00
		Keluaran: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		12 bulan	12 bulan				-		
		Hasil : Terwujudnya sarana penunjang untuk aktifitas administrasi kantor		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			20.000.000,00	3.289.900,00	(-16.710.100,00)			0,00
		Keluaran: tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai		12 bulan	12 bulan				-		
		Hasil : terwujudnya pencetakan blanko		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			25.000.000,00	12.500.000,00	(-12.500.000,00)			0,00
		Keluaran: terwujudnya penerangan		1 tahun	1 tahun				-		

		gedung kantor yang baik									
		Hasil : Penerangan kantor menjadi baik		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			5.000.000,00
		Keluaran: tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mendukung kegiatan		1 tahun	1 tahun					1 tahun	
		Hasil : Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktifitas kantor		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			7.000.000,00	5.600.000,00	(-1.400.000,00)			16.500.000,00
		Keluaran: terpenuhi makanan dan minuman untuk rapat kegiatan kantor		12 bulan	12 bulan					12 bulan	
		Hasil : Lancarnya tugas-tugas Badan Penghubung Provinsi Bali		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.09.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			400.000.000,00	79.504.180,00	(-320.495.820,00)			400.000.000,00
		Keluaran: terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar		12 bulan	12 bulan					12 bulan	
		Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.10.	Upacara	Masukan :	Jakarta			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			108.796.662,00

	Keagamaan	Jumlah Dana Keluaran: terlaksananya upacara keagamaan yang mendukung kegiatan kantor Hasil : Tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor		12 bulan	12 bulan					12 bulan	
4.11.4.11.01.01.01.12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran: tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Hasil : Terwujudnya sarana perlengkapan kantor yang berdaya guna	Jakarta			50.000.000,00	114.950.000,00	64.950.000,00			230.800.000,00
				1 tahun	1 tahun					1 tahun	
				100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran: terpeliharanya gedung/kantor dengan baik Hasil : Terwujudnya Sarana Kantor yang Terawat	Jakarta			357.293.824,00	418.567.912,00	61.274.088,00			655.902.017,00
				12 bulan	12 bulan					12 bulan	
				100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Masukan : Jumlah Dana Keluaran: Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia, Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 dan R4 yang	Jakarta			778.000.012,00	799.492.632,00	21.492.620,00			881.997.300,00
				1 tahun	1 tahun					1 tahun	

		dipelihara secara optimal									
		Hasil : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara optimal		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			89.300.000,00	18.100.000,00	(-71.200.000,00)			86.900.000,00
		Keluaran: peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang berdaya guna		12 bulan	12 bulan				12 bulan		
		Hasil : Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang berdaya guna		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.23.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			0,00	151.500.000,00	151.500.000,00			0,00
		Keluaran: Akses disabilitas pada Anjungan Bali TMII Jakarta		1 paket	1 paket				0		
		Hasil : tersedianya akses bagi penyandang disabilitas		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			10.000.000,00	8.199.800,00	(-1.800.200,00)			10.010.000,00
		Keluaran: dokumen perencanaan yang memadai		1 tahun	1 tahun				1 tahun		
		Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja		3 Dokumen	3 Dokumen						
4.11.4.11.01.01.01.50.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			0,00
		Keluaran: tersedianya		1 tahun	1 tahun				1 tahun		

		tabung pemadam yang siap pakai									
		Hasil : Terwujudnya bahan logistik kantor yang siap pakai		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.01.55.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			73.400.000,00	73.400.000,00	0,00			77.400.000,00
		Keluaran: terbayarnya PBB dan iuran lainnya dengan tepat waktu		1 tahun	1 tahun					1 tahun	
		Hasil : Pembayaran PBB dan iuran tepat waktu		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.02.	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah					1.716.174.905,00	1.007.588.208,00	(-708.586.697,00)			2.084.492.461,00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali		75	75	1.716.174.905,00	1.007.588.208,00	(-708.586.697,00)		80	2.084.492.461,00
4.11.4.11.01.01.02.01.	Kegiatan Pagelaran Seni budaya	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			332.106.000,00	0,00	(-332.106.000,00)			568.369.705,00
		Keluaran: terselenggaranya promosi kebudayaan Bali		1 kali	-					8 kali	
		Hasil : Persentase peningkatan informasi kebudayaan Bali yang diterima oleh pengunjung		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.02.02.	Kegiatan Pelestarian dan	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			120.206.451,00	49.459.600,00	(-70.746.851,00)			228.443.951,00

	Pengembangan Adat dan Budaya	Keluaran: terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta		100 Orang	50 Orang					100 Orang	
		Hasil : Persentase masyarakat Bali di Jakarta yang terbina dengan baik		100%	100%						
4.11.4.11.01.01.02.03.	Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Jakarta			1.263.862.454,00	958.128.608,00	(-305.733.846,00)			1.287.678.805,00
		Keluaran: terlaksananya kegiatan rutin pimpinan dengan lancar		1 tahun	1 tahun					1 tahun	
		Hasil : Persentase kelancaran kegiatan rutin pimpinan daerah		100%	100%						
	TOTAL					4.192.250.787,00	3.347.538.144,00	(-844.712.643,00)			4.557.798.440,00

DENPASAR, 30-07-2020